

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusumah, D. S., Solihin D. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah Investasi dan Desentralisasi (Tantangan dan Hambatan)*. Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya.
- Devas, Nick., Binder, Brian., dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI – Press).
- Drucker, Peter F. 1991. *Inovasi dan Kewiraswastaan*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____, Damayanti, Theresia,. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Moh. Zain. 2004. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, Siti Kurnia, dkk. 2006. *Perpajakan: konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Daerah*. (www.egov-rank.gunadarma.ac.id).
- Singarimbun, Masri., Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soesatro. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Jakarta: Kanisius
- Spillane, James J. 1994. *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Sugiono. 2007. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: ALFABETA.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suparmo dan Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Syamsi, Ibnu. 1988. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Widjaja, HAW. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumber lain:

- Alstete, Jeffrey W. 2014. *Revenue Generation Strategies: Leveraging Higher Education Resources for Increased Income*. Journal ASHE higher education report. Volume 41 Issue 1.
- Gebhardt, Heinz. 2013. *Tax Revenue Forecasts 2013-2018: significant increase*. Wirtschaftsdienst. Volume 93 Issue 1.
- Hammar, Henrik., Sjostrom, M. 2011. *Accounting for behavioral effects of increases in the carbon dioxide (CO²) taxin revenue estimation in Sweden*. International Bibliography of the Social Sciences (IBSS). Volume 39 Issue 10.
- Hasan, Ahmad B. 2015. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2010-2014*. Skripsi, Universitas Negeri Malang.

Jimut, Yohana F. 2015. *Kontribusi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*. Artikel Penelitian, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Kustiawan, Memen. 2005. *Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi. Volume 2 Nomor 1.

Wardhono, Aditya, dkk. 2012. *Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember*. J@TI Undip. Volume VII Nomor 2.

Undang-undang dan Peraturan lainnya:

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Direktur Jenderal Pajak.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Renstra Dinporabudpar Kabupaten Banyumas 2013-2018.